

ABSTRAK

Kemajuan teknologi berimplikasi pada semakin luas dan beragamnya bentuk-bentuk kejahatan. Salah satu kejahatan yang masif dewasa ini adalah *revenge porn*. Namun, tidak terdapat undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana *revenge porn*. Formulasi hukum di Indonesia memungkinkan untuk menjerat tindak pidana ini. terdapat 4 undang-undang yang dapat digunakan untuk menjerat *revenge porn*. Banyaknya undang-undang yang dapat menjerat *revenge porn* memiliki kelebihan dan kekurangan, namun hal ini dapat berimplikasi dalam menciptakan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Masalah di atas akan diteliti menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Formulasi hukum di Indonesia memberikan pilihan hukum ketika suatu perbuatan memenuhi beberapa undang-undang. Pemahaman asas *lex specialis* dalam menentukan undang-undang khusus mana yang digunakan menjadi solusi permasalahan tersebut. Kebijaksanaan dari penegak hukum tentunya dibutuhkan untuk dapat menerapkan undang-undang pada anak berkonflik dengan hukum yang melakukan *revenge porn*. Keputusan penegak hukum haruslah berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Penegakan hukum yang efektif dan logis dibutuhkan untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Putusan No.7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjg mencerminkan penegakan hukum yang sarat akan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: *Revenge Porn*, Anak Berkonflik Dengan Hukum, Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

Technological advances have implications for the wider and more diverse forms of crime. One of the massive crimes today is *revenge porn*. However, there is no law that specifically regulates the crime of *revenge porn*. The legal formulation in Indonesia makes it possible to ensnare this crime. there are 4 laws that can be used to ensnare *revenge porn*. The number of laws that can ensnare *revenge porn* has advantages and disadvantages, but this can have implications in creating legal uncertainty in the community. The above problem will be examined using a normative juridical method with a statutory approach. Legal formulation in Indonesia provides a choice of law when there are several special laws fulfilled by an act. Understanding the principle of *lex specialis* in determining which special law to use is the solution to the problem. Wisdom from law enforcement is certainly needed to be able to apply the law to children in conflict with the law who commit *revenge porn*. Law enforcement decisions must be oriented towards the best interests of the child. Effective and logical law enforcement is needed to create justice in society. Decision No.7/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tjg reflects law enforcement that is full of the best interests of children.

Keywords: *Revenge Porn*, *Children in Conflict with the Law*, *Juvenile Justice*